

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Fauzan Ari Yunus, Abdul Hadi, Sirat Hartaty Hadady

¹²³Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Khairun

fauzan251296@gmail.com, abdul_hadisirat@yahoo.com,

hartaty.hadady@unkhair.ac.id

ABSTRACT

The Effect of Presentation of Financial Statements, Accountability of Financial Statements and Internal Control on the Accountability of Regional Financial Management of the Morotai Island Regency Government. Head of the supervisory commission Abdul Hadi Sirat and members of the Supervisory Commission Hartaty Hadady. This study aims to analyze the effect of the presentation of financial statements, the accessibility of financial statements and internal control on the accountability of regional financial management. This research is quantitative research. The population in this study were all parts involved in regional financial management in the OPD of Morotai Island Regency... The sampling technique used purposive sampling. The data collection technique used in this study used a survey method. The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. Based on the results of the study, it shows that partially the presentation of financial reports has no effect on the accountability of regional financial management, the accessibility of financial reports has a significant positive effect on the accountability of regional financial management and internal control has a significant positive effect on the accountability of regional financial management.

Keywords: Report Presentation, Financial Report Accessibility, Internal Control, Regional Financial Management Accountability

ABSTRAK

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ketua komisi pembimbing Abdul Hadi Sirat dan anggota Komisi Pembimbing Hartaty Hadady. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Pulau Morotai.. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *survey*. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS (Statistical Product and Services Solution) versi 26. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penyajian Laporan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik. Seiring dengan era reformasi, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah terus mengalami perubahan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu upaya dalam menjawab permasalahan di tingkat daerah.

Akuntabilitas merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan lembaga publik, yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menyampaikan informasi transparan dan kredibel kepada publik. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi anggaran menegaskan pentingnya laporan keuangan sebagai alat utama dalam mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja lembaga. Akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah mengelola sumber daya secara efektif serta memberikan laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Mahmudi, 2016).

Menurut Herlina et al. (2021), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat terkait capaian serta kegagalan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Laporan keuangan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tolok ukur transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Aksesibilitas laporan keuangan berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas, karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk memverifikasi informasi secara transparan. Namun, penelitian Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan sektor publik masih terbatas akibat kendala teknologi dan kebijakan, sehingga menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan serta teknologi informasi yang mendukung keterbukaan data keuangan.

Selain penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal yang kuat juga berperan dalam menjaga integritas informasi keuangan. Pengendalian internal yang efektif mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, serta pemantauan berkala untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Menurut Zulkifli & Rahayu (2023), penerapan pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dan akuntabilitas sektor publik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Lebih lanjut, pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah Pulau Morotai juga menghadapi tantangan. Pengendalian internal yang baik seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah kesalahan serta kecurangan dalam pelaporan keuangan, namun implementasinya sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengendalian tersebut. Menurut Zulkifli dan Rahayu (2023), pengendalian internal

yang efektif merupakan faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan di sektor publik, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, yang sering kali menjadi kendala di daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran seperti Pulau Morotai.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal. Studi Hardiningsih et al. (2019), Purwaningrum et al. (2018), dan Superdi (2017) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Siti Aliyah (2012) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas, sementara Artini & Putra (2020) juga menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, penelitian Leatemia & Usmany (2021) serta Shadrina & Hidajat menunjukkan bahwa meskipun penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian lain oleh Wahida (2015), Sande (2013), dan Guasmin & Febrianti (2019) membuktikan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, studi Azizah et al. (2015) menemukan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas, tetapi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh signifikan. Ichlas et al. (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi, SPIP, dan aksesibilitas keuangan secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah, sedangkan penelitian Oktaviani & Sari (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Penelitian Pahlawan et al. (2020) serta Sundari & Mulyadi (2018) menemukan bahwa penerapan SPIP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, baik di tingkat dana desa maupun kementerian. Hal ini disebabkan oleh implementasi SPIP yang masih bersifat formalitas tanpa optimalisasi yang nyata, serta keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan sistem pengendalian internal.

Aksesibilitas laporan keuangan berperan dalam memberikan kemudahan bagi publik untuk memperoleh informasi keuangan pemerintah. Menurut Lewier & Kurniawan (2016), akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi guna melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Namun, hasil penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artini & Samtika Putra (2020) serta Putri (2018) juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya ditemukan bahwa terdapat ketidakkonsistenan masalah penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan penerapan SAP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, belum ada penelitian yang meneliti keempat variabel ini secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Selain adanya fenomena gap pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, penelitian ini juga dilakukan karena adanya riset gap pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2011) sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan *asset*, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

TINJAUAN LITERATUR

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, di mana agen bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal dengan imbalan tertentu. Konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara keduanya, terutama dalam menghindari risiko (Belkaouli, 2001 dalam Subhan, 2011). Dalam pemerintahan daerah, teori ini diterapkan sejak otonomi daerah 1999, di mana agen memiliki kewajiban untuk menyejahterakan prinsipal, meskipun sering muncul perbedaan preferensi.

Teori *Stewardship*, bagian dari *Agency Theory*, menyatakan bahwa manajer lebih mengutamakan kepentingan prinsipal daripada kepentingan pribadi. *Steward* memiliki integritas tinggi dan bertindak demi kepentingan *stakeholders* dan *shareholders* (Donaldson & Davis, 1991; Anton, 2010).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan kebijakan. Terdapat akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat) dan horizontal (kepada masyarakat) (Mardiasmo, 2020). Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai tanggung jawab individu dalam mengelola sumber daya publik (Ningsih, Arza, Sari, 2020; Wabster & Waluyo, 2007; Ekowati, 2017; Yoyo Sudaryo et al., 2017).

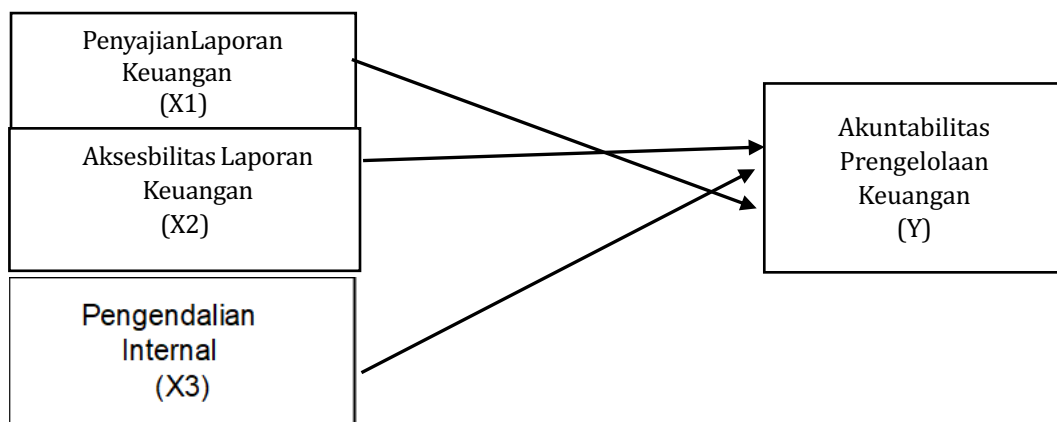
Penyajian laporan keuangan daerah diatur dalam PSAP No. 01 dan PP No. 71 Tahun 2010, yang bertujuan meningkatkan keterbandingan dan transparansi keuangan bagi pihak internal maupun eksternal (Mardiasmo, 2009; Pratolo et al., 2016; Saputra, 2012).

Aksesibilitas laporan keuangan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus meningkatkan aksesibilitas melalui berbagai media seperti internet dan televisi (Fauziyah &

Handayani, 2017; Aliyah & Nahar, 2012; Hehanussa, 2015; Wahyuni et al., 2014; Sanjaya et al., 2014; Shende & Bennet, 2004 dalam Wahyuni, 2014).

Pengendalian internal adalah sistem yang memastikan organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Ini mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan (Faiz Zamzami et al., 2018; Djalil, 2014; Khusani, 2018; Kamaluddin & Rapanna, 2017). Sistem ini berperan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas dana desa (Prastyaningtyas, 2019; Astuty, 2019).

KERANGKA PENELITIAN



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pengaruh penyajian laporan keuangan mengacu pada beberapa hasil penelitian antara lain; Fahmi, Rismawati Sudi & rman Hapid, Yusriwanti (2021), Rendalia Putri *et al* (2023), Revy Wilhelmina, 2023), Dika Kurniawan & Sri Rahayu (2019), menemukan penyajian laporan berpengaruh signifikan dengan arah positif, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut hasil penelitian Fauziyah dan Handayani (2017), Hehanussa (2015), dan Subekti, Rizani, dan Novriyandana (2015). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Wahyuni (2014) menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sanjaya dkk (2014) mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada

akses publik laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami.

Sagala (2011) menyimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan variabel ini sebagai berikut;

Fahmi, Rismawati Sudi & Hapid menyatakan aksesibilitas Laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah. Rendalia Putri *et al* (2023) Wahyuni (2014) menunjukkan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Dika Kurniawan & Sri Rahayu (2019), aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nur Ahmad Hasan (2017) aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah. Yusriwati (2021) aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ichlas, Basri, dan Arfan (2014) memberikan hasil bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. penelitian Sumiyati (2015), dan Henanussa (2015), yang juga menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu pada uraian di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian internal terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif

Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul Halim (2004:258), yaitu untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya pengendalian internal yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Rahmadi Murwanto (2012:195), pengendalian internal merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi.

Pendapat di atas didukung oleh penelitian seperti yang dilakukan oleh Cecilia Lelly Kewo (2017), menyatakan bahwa *the implementation of internal control influence on financial accountability of local governments in Indonesia*. Selain itu Revy Wilhelmina, (2023), Rendalia Putri *et al* (2023) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. penelitian yang dilakukan oleh Mirza Masyhur (2017), pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Embun Widya Sari (2017), dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa Pengendalian Intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Eli Budi Santoso (2016), sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan penelitian uraian di atas maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengendalian Internal Berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian survei pada pemerintah kabupaten Pulau Morotai.. Data yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui kuesioner.

Populasi adalah sumber data yang peneliti gunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi terkait fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, populasi merujuk pada keseluruhan individu, peristiwa, dan kelompok yang menjadi subjek dan objek penelitian serta menjadi dasar untuk menarik kesimpulan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 25 sampel yang diambil dari populasi itu. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili.

METODE PENELITIAN

Untuk menguji pengaruh antara pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Pulau Morotai adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program statistik Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) sebagai alat uji statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	R. Tabel	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	X1.1	0,543	0,30	Valid
	X1.2	0,543	0,30	Valid
	X1.3	0,775	0,30	Valid
	X1.4	0,717	0,30	Valid
	X.2.1	0,739	0,30	Valid
	X2.2	0,645	0,30	Valid

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	X2.3	0,691	0,30	Valid
Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,666	0,30	Valid
	X3.2	0,404	0,30	Valid
	X3.3	0,639	0,30	Valid
	X3.4	0,846	0,30	Valid
	X3.5	0,535	0,30	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,541	0,30	Valid
	Y2	0,868	0,30	Valid
	Y3	0,857	0,30	Valid
	Y4	0,691	0,30	Valid

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas (kekonsistenan) yang terlihat pada Tabel 1, maka diperoleh hasil bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai koefisien korelasi r -hitung > r -tabel yaitu 0,30 sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan item indikator variabel memberi hasil yang valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,752	Reliabel
2	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,754	Reliabel
3	Pengendalian Internal (X3)	0,738	Reliabel
4	Akuntabilitas Keuangan Daerah(Y)	0,751	Reliabel

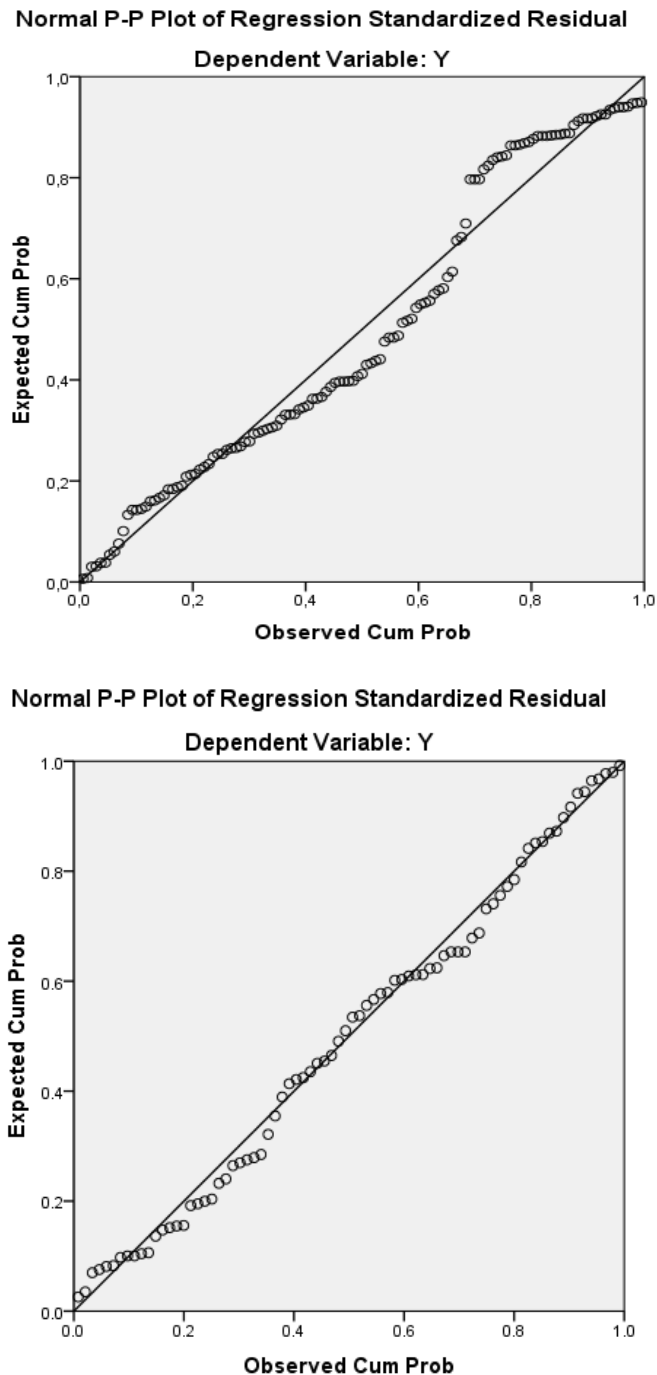
Sumber: Data primer, diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa semua nilai statistik *cronbach's alpha* (α) lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam fungsi ukurnya tidak menimbulkan arti ganda sehingga dapat mengukur Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dapat dilihat bahwa Penyajian Laporan Keuangan (X1) dengan nilai *cronbach's alpha* 0,752, Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) nilai *cronbach's alpha* 0,754, Pengendalian Internal (X3) nilai *cronbach's alpha* 0,738 dan Akuntabilitas Keuangan (Y) nilai *cronbach's alpha* 0,751. Maka kuesioner pada uji reliabilitas seluruhnya dinyatakan *reliable* sehingga berlanjut pada pengujian berikutnya.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Adapun hasil pengujian grafis normalitas dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (Lampiran)

Gambar 2 di atas, hasil pengujian grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arus garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengujian distribusi data yang dilakukan dengan metode grafis ini menunjukkan model regresi layak digunakan karena telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Regresi dikatakan baik jika suatu regresi tidak memiliki multikolinearitas di dalamnya sehingga tidak ada gangguan yang diharapkan akan terjadi pada regresi tersebut. Selanjutnya keberadaan multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai toleransinya, yaitu apabila $VIF > 10$ atau secara kebalikannya dengan melihat nilai toleransinya $< 0,1$.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	,881	1,135
X2	,907	1,102
X3	,884	1,132

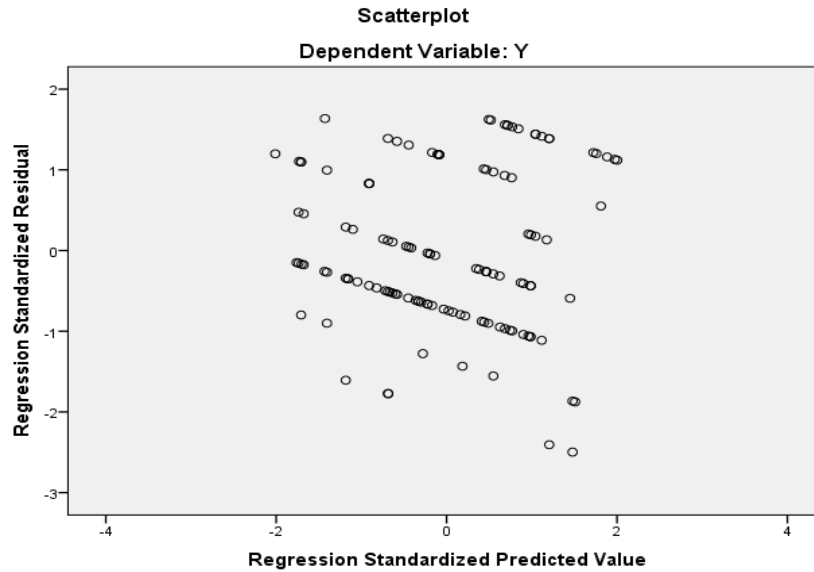
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer, di olah (2025)

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) kurang dari 10.

3. Uji Heterokedastisitas

Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* dimana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik dalam hal ini uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah garis nol secara acak. Hal ini berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas, melainkan homokedastisitas, dimana penelitian ini tidak menghasilkan parameter bias yang menyebabkan kesalahan dalam perlakuan.

Hasil Penelitian

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Adapun hasil pengujian secara serempak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)
ANOVAa**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,174	3	,725	4,635	,004 ^b
Residual	18,918	121	,156		
Total	21,092	124			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data primer, diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh 4,635, sedangkan F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) diperoleh angka 2,76. Dengan demikian, nilai F-hitung > F-tabel atau 4,635 >

2,76 yang berarti, variabel bebas akan berpengaruh serempak dengan variabel tidak bebas. Signifikansi tinggi karena 0,000 lebih kecil dari tingkat alpha sebesar 0,05. Hal ini dapat di katakan bahwa secara serempak Penyiapan Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan variabel Penyiapan Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan dapat diketahui melalui koefisien determinan (R^2). Adapun perolehan nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,321 ^a	,103	,081	,395

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data primer, di olah (2025)

Berdasarkan hasil uji determinasi pada Tabel 5, diperoleh nilai R sebesar 0,321 nilai ini menunjukkan Penyiapan Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Keuangan. Sedangkan nilai R Square (R^2) atau nilai koefisien determinasi adalah 0,103 atau 10,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Keuangan (Y) dipengaruhi oleh Penyiapan Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal dan sisanya sebesar 89,7% Akuntabilitas Keuangan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Adapun hasil pengujian secara parsial (t-hitung) dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,634	,508		5,185	,000
1 X1	,016	,095	,015	,163	,870
X2	,196	,097	,183	2,023	,045
X3	,181	,077	,217	2,365	,020

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer, di olah (2025)

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda dari model penelitian ini ada sebagai berikut:

$$Y = 2,634 + 0,016X1 + 0,192X2 + 0,181X3$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa:

- $\alpha = 2,634$, yang menunjukkan bahwa besarnya Akuntabilitas Keuangan sebesar 2,634 jika variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan variabel Pengendalian Internal (X3) tidak ada.
- $\beta_1 = 0,016$ merupakan koefisien regresi dari Penyajian Laporan Keuangan (X1) yang menunjukkan bahwa jika variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) mengalami peningkatan maka Akuntabilitas Keuangan (Y) juga akan meningkat.
- $\beta_2 = 0,192$ merupakan koefisien dari Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) yang menunjukkan bahwa jika variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) mengalami peningkatan maka Akuntabilitas Keuangan (Y) juga akan meningkat.
- $\beta_3 = 0,181$ merupakan koefisien dari Pengendalian Internal (X3) yang menunjukkan bahwa jika variabel Pengendalian Internal (X3) mengalami peningkatan maka Akuntabilitas Keuangan (Y) juga akan meningkat.

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara statistik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai signifikansi 0.870 yang lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang tidak relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami tidak dapat mencapai tujuan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Azizah et al. (2015) namun bertentangan dengan penelitian Sari (2017) dan Mulyanto et al. (2021) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas. Perbedaan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian laporan keuangan SKPD dan permasalahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan karakteristik kualitatif akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena memastikan transaksi keuangan disajikan dengan lengkap dan sesuai peraturan. Dalam teori keagenan, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai prinsipal. Demikian pula, teori *stewardship* menekankan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah harus memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan guna meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi kelalaian serta kecurangan (Ichalina, 2019).

Temuan ini berbeda dengan penelitian Mustofa (2012), Wahyuni et al. (2014), Ichalina (2019), Sande (2013), Wahida (2015), dan beberapa penelitian lainnya (Ajeng Ayu Sabriani, 2019; Siti Aliyah, 2012; Superdi, 2017; Purwaningrum dkk, 2018; Hardiningsih dkk, 2019; Yusriwati, 2021; Artini & Putra, 2020; Leatemia & Usmany, 2021) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Beberapa penelitian lainnya (Fahmi et al.; Dika Kurniawan & Sri Rahayu, 2019; Marjuki Segala Harjanto et al., 2024) juga menunjukkan hubungan positif ini. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas, terutama karena meningkatnya tuntutan transparansi dari publik serta kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan yang akurat.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai signifikansi 0,045 yang lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Aksesibilitas dikatakan baik jika pemerintah memfasilitasi kemudahan bagi publik dalam memperoleh informasi laporan keuangan daerah (Fauziah, 2017). Sesuai dengan teori *stewardship*, pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi keuangan bertanggung jawab untuk memberikan transparansi dengan menyediakan laporan yang mudah diakses. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah (Sanjaya dkk, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hehanussa (2015), Amin (2016), Fauziah (2017), dan Putri (2017), yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Dika Kurniawan & Sri Rahayu, 2019; Marjuki Segala, 2011; Harjanto & Rainaldo April Rin,

2024). Semakin terbuka publikasi laporan keuangan daerah melalui media massa dan internet, semakin mudah masyarakat mengakses informasi dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas publik meliputi perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan regulasi. Studi Aliyah & Nahar (2012) serta Sande (2013) juga menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memiliki aksesibilitas laporan keuangan yang baik, dengan informasi yang tersedia sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Daerah, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) untuk memberikan informasi tambahan mengenai kondisi keuangan daerah. Publikasi dilakukan melalui surat kabar dan *website* pemerintah daerah, sementara laporan keuangan bulanan dapat diakses di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan surat pengantar resmi.

Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah memenuhi standar akuntabilitas hukum, proses, dan kebijakan. Pelaporan dilakukan sesuai regulasi, transparan, dan tanpa penyalahgunaan jabatan. Program anggaran disusun untuk memastikan optimalisasi *output* dengan efisiensi biaya. Pemerintah daerah juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut sebagai pengakuan atas laporan keuangan yang berkualitas.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan studi Putri (2018) serta Puspa & Prasetyo (2020), yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kemungkinan karena keterbatasan akses informasi yang masih belum optimal dalam beberapa daerah.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di OPD Kabupaten Pulau Morotai. Semakin baik penerapan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan, maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang efektif memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi, mendukung teori *stewardship* di mana manajemen dan audit internal berperan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan sistem pengendalian internal juga berfungsi sebagai upaya mencegah kecurangan dan korupsi, serta meningkatkan kinerja dan transparansi di lingkungan pemerintahan.

Semakin kuat sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh OPD Kabupaten Pulau Morotai, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal berperan dalam mengurangi penyimpangan dalam pelayanan publik dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2012), Ichlas (2014), dan Azizah et al. (2015), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Studi lain juga mendukung temuan ini, termasuk Gita Sari (2023), Kencana & Dyah Fitria (2023), serta Ajeng Ayu Sabriani (2019), yang menyatakan bahwa pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun, penelitian Fahmi et al. (2016) menemukan bahwa meskipun pengaruhnya positif, dampaknya tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan studi Pahlawan et al. (2020), yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sundari & Mulyadi (2018) juga menemukan bahwa penerapan SPIP tidak berpengaruh secara signifikan pada pengelolaan keuangan di tingkat kementerian. Demikian pula, studi Artini & Samtika Putra (2020) serta Putri (2018) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur-unsur dalam penyajian laporan keuangan, seperti kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan, belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebaliknya, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin mudah pemerintah memberikan akses bagi pengguna untuk memperoleh informasi laporan keuangan, semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, pengendalian internal juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik pemerintah dalam menerapkan pengendalian internal terhadap OPD melalui sistem pengawasan yang efektif, semakin meningkat pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2).
- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara* [Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama, Jepara].
- Alqodri, M. (2015). Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. *JOM Fekon*, 2(2), Oktober 2015.
- Amin, A. (2016). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar*.
- Aprianti, D. N. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2460-0784.
- Armanza, A. H. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Artini, N. L. W., & Putra, P. D. S. (2020). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung).
- Arumanti, N. R. (2018). *Aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan internal control sebagai variabel moderating (Studi pada pemerintah Kabupaten Gowa)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Avisha, I. (2023). *Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)* [Disertasi, Universitas Pakuan].
- Avisha, I., Slamet, B., & Wibowo, S. (2024). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor).
- Azizah, N., Junaidi, A. R., & Setiawan. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Bandariy, H. (2010). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah* [Skripsi, Universitas Diponegoro].
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Diamond, J. (2002). Performance budgeting—Is accrual accounting required? *IMF Working Paper, Fiscal Affairs Department*, December, 1–31.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas keuangan daerah: Implementasi pasca reformasi*. Jakarta: RMBooks.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholders return. *Australian Journal of Management*, 16(1), 4.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), Juni. <https://doi.org/10.12345/jira.v6i6.1236>
- Fauziyah, M. R., Sudirman, R., & Hapid. *Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Kota Palopo (Studi pada Kantor BPKAD Kota Palopo)*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Seri bunga rampai manajemen keuangan daerah: Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1236>
- Hasan, N. A. (2017). *Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Gowa* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Hasibuan, N. H., & Torong, M. Z. B. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pemerintah Kota Tebing Tinggi).
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintahan Kota Ambon). *Jurnal UNISSULA*.

- Ichalina, F. (2019). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Jawa Timur)*.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Sekretariat Daerah Kota Mataram tahun 2018).
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2018). *eProceedings of Management*, 6(1).
- Leatemia, S. Y., & Usmany, P. (2021). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Lewier, C. N. (2016). *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, M. (2002). Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik: Telaah kritis terhadap upaya aktualisasi kebutuhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjuki, S. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Masyhur, M. (2017). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai. *JOM Fekon*, 4(1), 2.
- Nurhayani, H. (2013). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Survei seluruh dinas di pemerintahan Kota Bandung).
- Nurlaili. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *JOM Fekon*, 3(1), Februari 2016.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.

- Pemerintah Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rahma, N., Agusti, R., & Wiguna, M. (2017). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, 4(2).
- Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) [Skripsi, Universitas Negeri Padang].
- Santoso, E. B. (2016). *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Kabupaten)*.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).
- Sendra, Y., & Usmany, P. (2021). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Shende, S., & Bennet, T. (2004). *Concept paper 2: Transparency and accountability in public financial administration*. UN DESA.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, B., et al. (2017). *Kebijakan akuntansi akrual pemerintahan daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usriwanti, Y. (2021). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 1(2), 65-77.
- Wahida. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Wahyuni, P. S. (2014). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Zama, R. E. (2010). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.